

**PENGARUH APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN
ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



oleh :

**DEVA JELITA
NIM. 07011281823047**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“PENGARUH APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
DEVA JELITA
07011281823047

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2022

Pembimbing I

1. Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003



Pembimbing II

2. Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si
NIP. 197808182009121002



Mengetahui
Ketua Jurusan,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
199108272009121002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"PENGARUH APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR"

Skripsi

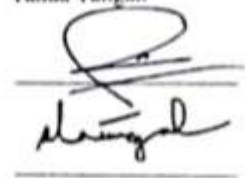
oleh :
DEVA JELITA
07011281823047

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
2. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002
2. Januar Eko Aryansah, S.IP.,S.H.,M.Si
NIP. 198801272019031005

Tanda Tangan



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP. 196601221990031004


Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deva Jelita
NIM : 07011281823047
Tempat dan Tanggal Lahir : Kedaton, 15 Januari 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik dari Universitas Serwijaya maupun perguruan tinggi lainnya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 13 Juni 2022

Yang Membuat Surat Pernyataan



Deva Jelita

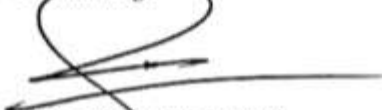
07011281823047

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh penerapan aplikasi SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang mana variabel kegunaan dan kemudahan SIMDA sebagai variabel bebas dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat juga melibatkan variabel sosiodemografis responden sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang memiliki dua unsur yaitu unsur kegunaan dan unsur kemudahan. Juga Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dilihat dari 4 faktor yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah sosiodemografis responden yang terdiri dari, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/pangkat dan masa kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kegunaan secara parsial terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebelum dikontrol dengan variabel sosiodemografis adalah sebesar 62,7%. Kemudian pengaruh variabel kemudahan secara parsial terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebelum dikontrol dengan variabel sosiodemografis adalah sebesar 27,8 % atau tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya besaran pengaruh variabel kegunaan dan variabel kemudahan secara bersama-sama terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebelum dikontrol dengan variabel sosiodemografis adalah sebesar 62,9%. Sedangkan ketika dikontrol dengan variabel sosiodemografis, variabel kegunaan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 75,5% begitupun dengan variabel kemudahan secara parsial ketika dikontrol dengan variabel sosiodemografis juga berpengaruh signifikan sebesar 67,3%. Jika dinyatakan dengan persentase besaran pengaruh variabel kegunaan dan kemudahan terhadap variabel kualitas laporan keuangan secara bersama-sama ketika dikontrol dengan variabel sosiodemografis adalah sebesar 75,8%.

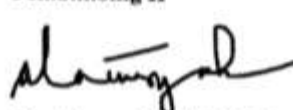
Kata Kunci : Pengaruh SIMDA, Kualitas Laporan Keuangan, Sosiodemografis

Pembimbing I



Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si
NIP.197808182009121002

Indralaya, Juni 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This study entitled "The Effect of Regional Management Information System Applications on the Quality of Financial Reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Ogan Ilir Regency". This study aims to analyze the effect of implementing the SIMDA Finance application on the Quality of Financial Reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Ogan Ilir Regency. This research is a quantitative study in which the variables of the usefulness and convenience of SIMDA as independent variables and the quality of financial reports as the dependent variable also involve the sociodemographic variables of the respondents as control variables. This study uses the Technology Acceptance Model (TAM) which has two elements, namely an element of usability and an element of convenience. Also based on Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah which states that the quality of financial reports is seen from 4 factors namely relevant, reliable, comparable and understandable. While the control variables used were sociodemographic respondents consisting of, age, gender, education level, class/rank and years of service. The results of this study indicate that the effect of the usability variable partially on the quality of financial statements before being controlled by sociodemographic variables is 62,7%. Then the effect of the convenience variable partially on the quality of financial statements before being controlled by sociodemographic variables is 27,8% or has no significant effect. Furthermore, the magnitude of the effect of the usefulness variable and the convenience variable together on the financial statement quality variable before being controlled by sociodemographic variables is 62,9%. Meanwhile, when controlled by sociodemographic variables, the usefulness variable partially has a significant effect on the quality of financial reports by 75.5% as well as the convenience variable partially when controlled by sociodemographic variables also has a significant effect of 67.3%. If it is expressed as a percentage of the magnitude of the effect of the usability and convenience variables on the financial statement quality variable together when controlled with sociodemographic variables, it is 75.8%.

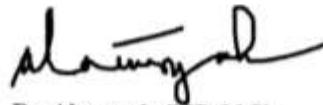
Keywords: Effect of SIMDA, Quality of Financial Reports, Sociodemographic

Advisor I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Advisor II



Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

Indralaya, Juni 2022

Chairman of The Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua Orang Tua Bapak M. Yunus dan Ibu Zuryani sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. Terima kasih atas do'a, bantuan dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Syawal, SE sebagai Kepala Sub Bidang Belanja langsung Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Seluruh Keluarga Besar Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Seluruh Staf beserta karyawan yang ada di FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
9. Aspin Cahya, *as my special person* sekaligus pendamping yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses pembuatan skripsi ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juni 2022

Deva Jelita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
B. Penelitian terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran	34
D. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Definisi Konsep	41
C. Definisi Operasional Variabel	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Populasi dan Sampel.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	45
H. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Hasil.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	55
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	56
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	57
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	59
5. Sumber daya manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	80
B. Pengujian Analisis Data Statistik.....	83
1. Uji Validitas Instrumen.....	83
2. Uji Reliabilitas Instrumen.....	84
C. Analisis Univariat.....	85
D. Uji Normalitas.....	88
E. Analisis Bivariat.....	89
1. Koefisien Korelasi Tunggal.....	89
2. Koefisien korelasi ganda.....	90
F. Analisis Multivariat.....	91
1. Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t).....	91
2. Uji Koefisien Regresi Simultan (uji F).....	93
G. Uji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness of Fit Test</i>).....	94
H. Uji Determinasi (<i>R²</i>).....	95
I. Pembahasan.....	97
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir :	4
Tabel 2: Data pengguna aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di Indonesia Tahun 2020	6
Tabel 3: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
Tabel 4 : “Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan” “Pengaruh Aplikasi SIMDA Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	29
Tabel 5 : Definisi Operasional Variabel	42
Tabel 6: Populasi pegawai di 4 Bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.	44
Tabel 7 : Bentuk Tabel Skala Likert.....	45
Tabel 8 : Sumber Daya BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	81
Tabel 9 : Sumber Daya BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	82
Tabel 10 : Sumber Daya BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	82
Tabel 11 : Hasil Uji Validitas Variabel X_1	83
Tabel 12 : Hasil Uji Validitas Variabel X_2	83
Tabel 13 : Hasil Uji Validitas Variabel Y	84
Tabel 14 : Reliability Statistics variabel X_1	84
Tabel 15 : Reliability Statistics variabel X_2	85
Tabel 16 : Reliability Statistics variabel Y	85
Tabel 17 : Analisis Univariat	85
Tabel 18 : Hasil Uji Normalitas Data	88
Tabel 19 : Tabel Analisis Bivariat	89
Tabel 20 : Hasil analisis korelasi ganda	90
Tabel 21 : Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)	91
Tabel 22 : Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) ketika dikontrol dengan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/pangkat dan masa kerja	92
Tabel 23 : Hasil Uji Regresi Berganda	93
Tabel 24 : Hasil Uji Regresi Berganda Ketika dikontrol oleh variabel sosiodemografis....	93
Tabel 25 : Uji Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test	94
Tabel 26 : Uji Determinasi (R^2) Variabel X_1	95
Tabel 27 : Uji Determinasi (R^2) Variabel X_1 ketika dikontrol.....	95
Tabel 28 : Uji Determinasi (R^2) Variabel X_2 ketika dikontrol.....	95
Tabel 29 : Uji Determinasi (R^2) Variabel X_2	96
Tabel 30 : Uji Determinasi (R^2) pengaruh Variabel X_1 dan Variabel X_2 secara bersama-sama terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y)	96
Tabel 31 : Uji Determinasi (R^2) pengaruh Variabel X_1 dan Variabel X_2 secara bersama-sama ketika dikontrol.....	96
Tabel 32 : Skala Agresivitas	105
Tabel 33 : Usia Responden	106
Tabel 34 : Jenis Kelamin Responden	107
Tabel 35 : Pendidikan Terakhir Responden	107
Tabel 36 : Golongan / pangkat Responden.....	107
Tabel 37 : Masa Kerja Responden.....	107
Tabel 38 : Tabel analisis data statistik deskriptif	108
Tabel 39 : Hasil Uji validitas variabel X_1	108
Tabel 40 : Hasil Uji validitas variabel X_2	109

Tabel 41 : Hasil Uji validitas variabel Y	110
Tabel 42 : Hasil Analisis Korelasi Variabel Kegunaan (X1) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	111
Tabel 43 : Hasil Analisis Korelasi Variabel Kemudahan (X2) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	111
Tabel 44 : Hasil Analisis Korelasi Usia (X3) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	112
Tabel 45 : Hasil Analisis Korelasi Jenis Kelamin (X4) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	112
Tabel 46 : Hasil Analisis Korelasi Tingkat Pendidikan (X5) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	112
Tabel 47 : Hasil Analisis Korelasi Golongan/pangkat (X6) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	113
Tabel 48 : Hasil Analisis Korelasi Masa Kerja (X7) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	113
Tabel 49 : Hasil Analisis Korelasi Variabel Kegunaan (X1) dan Kemudahan X2 dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Original TAM yang diusulkan oleh Fred Davis (1989)	22
Gambar 2. Kerangka Berfikir Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.	35
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	58
Gambar 4. Tanggapan Responden Mengenai Kegunaan SIMDA.....	87
Gambar 5. Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan SIMDA.....	87
Gambar 6. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Skala Agresivitas.....	105
Lampiran 2	Hasil Olah Data SPSS.....	106
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian.....	114
Lampiran 4	Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi.....	116
Lampiran 5	Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	117
Lampiran 6	Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing 1.....	118
Lampiran 7	Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing 2.....	119
Lampiran 8	Lembar Perbikan Seminar Proposal.....	121
Lampiran 9	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	122
Lampiran 10	Surat Rekomendasi Penelitian.....	123
Lampiran 11	Surat Balasan Izin Penelitian.....	124
Lampiran 12	Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1.....	125
Lampiran 13	Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2.....	126
Lampiran 14	Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	128

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
DINKES	: Dinas Kesehatan
DPA	: Dokumen Pelaksanaa Anggaran
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
RKA	: Rencana Kinerja Anggaran
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIPD	: Sistem Infomasi Pemerintah Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPD	: Surat Permintaan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
STS	: Surat Tanda Setoran
TAM	: <i>Technology Acceptance Model</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sektor publik khususnya di Indonesia yang semakin pesat merupakan upaya pemenuhan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil temuan *White Book Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation* yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa penguasaan teknologi berpengaruh sebesar 89% pada kinerja sebuah Negara terutama sektor publik dalam memenuhi SDGs (Satriya, 2019). Pemanfaatan teknologi selain meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat, juga berdampak pada konektivitas antara individu dan organisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi pada seluruh bidang pembangunan. Reformasi pembangunan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menitik beratkannya pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan dalam menerima setiap kemajuan yang ada termasuk dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah yang merupakan bentuk *upgrading* sistem akuntansi pemerintahan. Dengan adanya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara. Harus diakui bahwa saat ini *good*

governance masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. *Good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods dan services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya (Sinaga 2007).

Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik, paling tidak terdapat alasan utama mengapa *good governance* masih jauh dari kenyataan. Salah satunya yaitu belum optimalnya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Hal tersebut dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem akuntansinya tidak memadai dan belum terintegrasi secara menyeluruh maka sudah barang tentu sistem pencatatan dan pelaporannya kurang handal. Berbicara soal pelaporan, Laporan Keuangan merupakan *output* dari akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Yang artinya tolak ukur baik atau tidaknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dilihat dari bagaimana laporan keuangan pemerintah daerahnya. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh lapisan aparatur termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode. Laporan keuangan diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan SKPD selanjutnya kembali dijadikan satu kesatuan menjadi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tujuan Pemeriksaan atas laporan Keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*)
3. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*)
4. Opini Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Maka dari itu pemerintah terus berupaya memberikan kebijakan terbaik terkait sistem pengelolaan keuangan agar dapat menyajikan laporan sebaik-baiknya sehingga akuntabilitas kinerja keuangan dapat terjamin.

Setiap pemerintah daerah akan diberikan penilaian atas laporan keuangannya termasuk Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir :

No.	LKPD Tahun Anggaran	Tahun pemeriksaan	Hasil Opini
1.	LKPD Tahun 2016	2017	WTP
2.	LKPD Tahun 2017	2018	WTP
3.	LKPD Tahun 2018	2019	WTP
4.	LKPD Tahun 2019	2020	WTP

Sumber : website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir pada 4 tahun terakhir dapat mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dilihat dari hasil pemeriksaan oleh BPK, secara garis besar laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak mengalami kendala suatu apapun, meskipun pada proses pengelolaannya masih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang lama.

Semangat reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *Good Governance* secara konsisten. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah. Sistem Informasi merupakan kebutuhan bagi suatu entitas dalam menjalankan aktivitasnya. Kelangsungan hidup organisasi sangatlah sulit tanpa penggunaan teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi penting dalam membantu organisasi menghadapi pesatnya arus ekonomi global. Pada saat bersamaan,

organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru.

Salah satu upaya penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, dan *auditable* diwujudkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan memfasilitasi pemerintah dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi (*computerized*). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan respon positif atas terbitnya permendagri ini, dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi dimaksud adalah Program Aplikasi Komputer SIMDA. Program aplikasi ini telah diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Forum SAKD di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi Bogor.

“Secara umum, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai

dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen” (Machmud, Rizan. 2013).

“Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya” (BPKP, 2008).

Sampai dengan 30 Juni 2020, Program Aplikasi SIMDA yang merupakan salah satu aplikasi penunjang sistem akuntansi sektor publik pemerintahan daerah yang baru dijalankan oleh 440 Pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah yang ada, terdiri dari :

Tabel 2: Data pengguna aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di Indonesia Tahun 2020

No.	Jenis Implementasi	Jumlah Pemerintah Daerah
1	SIMDA Keuangan	394
2	SIMDA BMD	403
3	SIMDA Gaji	51
4	SIMDA Pendapatan	169
5	SIMDA <i>Integrated</i>	196
6	<i>Dashboard</i> Keuangan	5
7	Koneksi CMS	225
	Pemerintah daerah Pengguna SIMDA	440

Sumber : website resmi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pengguna aplikasi pendukung sistem akuntansi sektor publik hanya 440 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah atau jika dalam

persentase sebesar 81,19%. Sedangkan pada aplikasi SIMDA Keuangan hanya 72,7% atau 394 pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sebagai alat penunjang sistem akuntansi pemerintah, dalam praktiknya SIMDA dapat menghasilkan berbagai laporan salah satunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dari seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang biasa disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sama halnya dengan LKPD, Laporan keuangan SKPD juga harus dipertahankan kualitasnya. Maka dari itu penting untuk terus dievaluasi dari tahun ketahun baik dari segi perencanaan, pengelolaan, penyusunan, hingga evaluasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu SKPD yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Laporan keuangan di BPKAD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2015 meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Salah satu contoh Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penggunaan SIMDA adalah Laporan Realisasi Anggaran yang pada penelitian ini berfokus pada laporan keuangan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir

**Tabel 3: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Ilir**

No.	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)
1.	2020	1.742.870.674.726,23	1.588.599.491.000,40	91,14%
2.	2019	1.752.808.762.006,88	1.574.047.494.490,64	89,80%
3.	2018	1.559.297.511.197,06	1.315.968.613.499,50	84,40%
4.	2017	1.453.297.511.197,06	1.102.973.684.241,32	75,89%
No.	Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase (%)
1.	2020	1.620.077.668.496,00	1.509.257.842.606,19	93,15%
2.	2019	1.684.762.788.194,11	1.630.999.584.105,10	96,80%
3.	2018	1.542.258.258.561,85	1.366.601.424.693,52	88,61%
4.	2017	1.542.879.089.106,21	1.243.190.688.873,14	80,57%

Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Persentase realisasi anggarannya juga baik dari tahun-ketahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dikelola dengan baik. Namun kembali lagi apakah dalam proses pengelolaannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena untuk mendapatkan penilaian yang baik dipengaruhi banyak hal sebagaimana Kriteria diantaranya, adalah: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Keseriusan pemerintah daerah termasuk didalamnya satuan kerja perangkat daerah dalam mengadopsi SIMDA berdasarkan tabel penggunaan SIMDA di Indonesia yang

hanya mencapai 72,7% berujung pada pembaharuan aplikasi SIMDA Keuangan dengan berbagai versi hingga dengan mengubahnya menjadi Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) seperti tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018. Kemudian Kementerian Dalam Negeri kembali memperbaharainya dengan menghadirkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal tersebut dikarenakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman, dipedomani dan diimplementasikan sebagai acuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah termasuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan. Semuanya jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan SIPD dalam urusan pemerintahannya.

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewasa ini menuntut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah turut mengadopsi solusi yang ditawarkan pemerintah dengan harapan yang sama agar

akuntansi sektor publik terutama laporan keuangan pemerintah lebih berkualitas demi terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No.70 Tahun 2019 memperhatikan Permendagri No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa proses perencanaan, pengumpulan, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan hingga pemeriksaan keuangan daerah berbasis elektronik atau komputerisasi yakni dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020).

Fakta yang penulis temui di lapangan, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir belum secara penuh menggunakan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya pengelolaan keuangan terutama proses penyusunan laporan keuangan SKPD masih mereka lakukan dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, yang secara aturan standar akuntansi telah diperbaharui sebagaimana diatur dalam permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah mencabut dan menggantikan Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan reformasi dari SIMDA.

Berdasarkan pasal 2 Permendagri No. 70 Tahun 2019 dijelaskan bahwa ruang lingkup SIPD meliputi :

1. Informasi Pembangunan Daerah

2. Informasi Keuangan daerah,
3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya (Pemandagri 2019).

Seharusnya penggunaan SIPD ini menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD sebagai wujud akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh BPKP dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang telah digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hadirnya SIMDA ditengah-tengah manajemen pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini patut dipertanyakan. Apakah bertahannya kualitas Laporan Keuangan SKPD di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir beberapa tahun terakhir karna ada pengaruh dari konsistensi BPKAD Ogan Ilir untuk tetap menerapkan SIMDA dan enggan mengadopsi sistem terbaru yaitu SIPD. Padahal bupati Ogan Ilir sendiri menyatakan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni BPKAD Kabupaten Ogan Ilir taat pada aturan yang berlaku. Kualifikasi SIPD telah didesain sedemikian rupa guna memperbaiki cacatnya sistem yang diterapkan sebelumnya. Pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi terbaru sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Oleh sebab itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang lebih mutakhir dan memadai sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah yang berlaku.

Pengaruh SIMDA terhadap laporan keuangan telah banyak menarik perhatian peneliti. Diantaranya C. Ariska, Masniadi, dan Rachman (2019) bagaimana penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Sumbawa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nasution dan Nurwani (2021) juga menganalisis penerapan SIPD di BPKAD Kota Medan dengan hasil penelitian bahwa SIPD digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan program dari pemerintah Kota Medan. Selanjutnya. Afrizal (2019) dengan penelitian pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan antara independen (Aplikasi SIMDA) secara parsial terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Kemudian Y. I. Ariska dan Indriasari (2019) juga menganalisa pengaruh penggunaan SIMDA terhadap kualitas LKPD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi 75,3%. Ananda dan Sari (2020) juga meneliti pengaruh implementasi SIMDA Keuangan terhadap kualitas Laporan Keuangan di DINKES Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini juga menyatakan bahwa secara parsial SIMDA Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya Lynda (2018) meneliti apakah implementasi SIMDA, kualitas SDM, dan penerapan standar akuntansi dan SPIP mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dengan hasil Kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah, penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Runtuwene, Saerang, dan Morasa (2017) juga melakukan penelitian yang sama dengan hasil yang sama juga. Begitupun

dengan Alfian (2016) yang berhasil membuktikan bahwa Aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual.

Berbagai variabel dan sudut pandang diterapkan oleh peneliti diatas namun belum ada yang meneliti bagaimana pengaruh aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan di suatu instansi disaat peraturan yang mengizinkan penerapan SIMDA yakni Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan hasil pertimbangan dari Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dan digantikan dengan Permendagri No.70 Tahun 2019 diperkuat dengan Permendagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan sistem komputerisasi sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terbaru yakni SIPD bukan SIMDA ataupun penggunaan secara berdampingan apapun alasannya. Pun jika masih dalam masa adopsi namun BPKAD Kabupaten Ogan Ilir belum menunjukkan upaya optimal penggunaannya dari semenjak peraturan tersebut dikeluarkan. Berbeda dengan Kabupaten lain seperti Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah menerapkan secara optimal SIPD dalam pengelolaan keuangannya.

Melihat fakta demikian menarik keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aplikasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Kegunaan SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ?.
2. Bagaimana Pengaruh Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ?.
3. Bagaimana Pengaruh Kegunaan dan Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ?.
4. Bagaimana Pengaruh Kegunaan SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja ?.
5. Bagaimana Pengaruh Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja ?.
6. Bagaimana Pengaruh Kegunaan dan Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kegunaan SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kegunaan dan Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kegunaan SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja.
5. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja.
6. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kegunaan dan Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh civitas akademika jurusan Ilmu Administrasi Publik.

2. Secara Praktis,

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam meningkatkan implementasi kebijakan-kebijakan atau program-program yang sudah direncanakan dan diterapkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Andi. 2019. "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu." *Hirarki : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 1(1): 58–62.
- Alfian, Mohammad. 2016. "Faktor Pendukung Implementasi SIMDA Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18(3): 119.
- Allen dan Meyer. 2013. *The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to Organization*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ananda, Febryandhie, and Mustika Permata Sari. 2020. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman)." *Jurnal Pundi* 04(02): 241–50.
- Ariska, Cici, Rudi Masniadi, and Rosyidah Rachman. 2019. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan (JRKTL)* 2(1): 15–23.
- Ariska, Yesi Indian, and Nia Indriasari. 2019. "Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu)." *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12(2): 51–63.
- Arikunto, S. 2010. *"Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik"*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asnawi, Lynda, Meinarni Pangayow and Billi J. C. 2019. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset* 4(2):72
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. Kode Etik Dan Standar Audit. Edisi Kelima. Bogor : Pusdiklat BPKP.
- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Creswell, John W. 1966. *"Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches."* United States of America : Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- DeLone, William H. and Ephraim R. Mc. Lean. "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update". *Journal of Management Information Systems*. 19(4) : 19–30
- Devi, V. F. P. 2013. Pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah (penelitian pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fahrurrozi, Handia. 2019. "Pengaruh Penggunaan Simda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik Daerah." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 124–38.
- Fatmawati, Endang. 2015. "Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Menganalisis Sistem Informasi Perpustakaan." *Iqra' : Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 9(1): 1–13. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/66>.
- Jogiyanto, HM. 2008. *"Analisis Dan Desain."* *Sistem Informasi Manajemen*". Yogyakarta : Analisa dan Desain.

- Maulia, Shelly (2014). Pengaruh Usia, Pengalaman dan Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Muzahid, Mukhlisul (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *"Jurnal Akuntansi, Media Riset Akuntansi dan Keuangan"* 2(2)
- Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 109–16.
- Nugraha, Harmadhani Adi and Yuli Widi Astuti. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)." *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1) : 25–33
- O'brien, James. A and George M. Marakas. 2008. *"Management Information Systems"*. Yogyakarta : McGraw Hill
- Popoola, S. O. (2009). Organizational commitment of records management personnel in Nigerian private universities. *"Records Management Journal"* 19(3), 204–217.
- Pemendagri. 2019. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah." *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* Nomor 65(879): 2004–6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2020. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah." : 1–445.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Runtuwene, Christina, David P E Saerang, and Jenny Morasa. 2017. "Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(2): 299–307.
- Satriya, Eddy. 2019. *"Indonesia Digital For Future Economy and Inclusive Urban Transformation"*. Jakarta : Deputy Assistant for ICT and Utility.
- Sinaga, H. Obsatar. 2007. *"Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia Dan Peranan Lembaga Negara Dalam Membangun NKRI"*. Administratur.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Sugiyono. Bandung : Alfabeta
- The World Bank, 2005. *Pembangunan Berspektif Gender : Melalui Kesetaraan, Gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Aspirasi*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Turner, Jonathan. H, 2012. *"Contemporary Sociological Theory"*. California : SAGE Publication
- Yi-Ching Chen, M., Shui Wang, Y., dan Sun, V. (2012). Intellectual capital and organizational commitment. *Personnel Review*, 41(3), 321–339.